

Penerimaan Hak dan Kewajiban Terhadap Akses Pendidikan yang Merata di Indonesia

Yazid Setiaji¹ Mochamad Aziz Zhafir² Rifania Anjani³ T Heru Nurgiansah⁴

Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email:

Abstract

This research is motivated by the problem of acceptance of the rights and obligations of citizens to gain access to proper education for all citizens. This research aims to find out how access to education in Indonesia is uneven, especially in the South Bolaang Mogondow area, South Sulawesi. The analysis in this study uses the literature method by finding sources from journals, books, or other references. The result of this research is to find out the basic problem of uneven education in the South Bolaang Mogondow area, South Sulawesi because there are several factors that are quite a major problem such as; economic factors and environmental factors.

Keywords: Rights and Obligations, Education, Equitable

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang karena adanya permasalahan penerimaan hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan akses Pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akses Pendidikan di Indonesia yang belum merata terutama di daerah Bolaang Mogondow Selatan, Sulawesi Selatan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan dengan mencari sumber sumber dari jurnal, buku, atau referensi lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar permasalahan Pendidikan yang tidak merata di daerah Bolaang Mogondow Selatan, Sulawesi Selatan karena adanya beberapa faktor yang cukup menjadi permasalahan utama seperti; faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Pendidikan, Merata



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara umum, pendidikan adalah proses mengajarkan suatu pengetahuan, keterampilan atau budi pekerti dari satu generasi ke generasi lainnya di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak (belajar sendiri). Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dimana peserta didik agar dapat mempelajari, mengetahui, mengevaluasi dan menerapkan segala pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis pendidikan berasal dari Bahasa kata latin ducare yang berarti memimpin, menuntun atau mengarahkan, sedangkan e yang berarti “keluar” maksudnya dari dalam ke luar atau dari sedikit menjadi banyak. Pendidikan menuntun seseorang keluar dari ketidaktahuan tentang sesuatu menjadi tahu. Secara khusus proses pembelajaran berlangsung di ruang kelas atau suasana pembelajaran formal (sd- perkuliahan). Namun, secara umum pendidikan dapat dilakukan dimana saja, baik melalui pembelajaran online, home-schooling, otodidak, pembelajaran tatap muka maupun pengalaman pribadi.

Fungsi pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak, atau pun kepribadian dari peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang lebih bermartabat. Horton, Hunt dan David Popenoe turut memberikan pendapat

mengenai hubungan dari fungsi pendidikan dengan lembaga pendidikan itu sendiri, yang diantaranya terbagi menjadi beberapa fungsi di bawah ini;

1. Mempersiapkan masyarakat untuk memiliki penghidupan yang lebih mandiri.
2. Proses pembinaan dan pengembangan minat atau pun bakat dari peserta didik, baik itu untuk kepuasan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat umum.
3. Sebagai tindakan untuk melestarikan budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri.
4. Proses untuk menciptakan keterampilan yang juga diperlukan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi.
5. Sebagai suatu proses transfer/pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya.
6. Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
7. Bentuk integrasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat
8. Melalui lembaga pendidikan juga dapat digunakan untuk mengajarkan bentuk-bentuk ciri-ciri kepribadian.
9. Menjadikannya sebagai sumber inovasi dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.
10. Mensosialisasikan pada peserta didik mengenai perbedaan atau kultur yang ada di masyarakat luas, mulai dari perbedaan agama, suku, dan juga budaya.

Namun, persepsi umum terhadap pendidikan secara keseluruhan di Indonesia masih sangat jauh dari kata baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 44,19 juta murid di Indonesia pada tahun ajaran 2022/2023. Jumlah tersebut turun 1,56% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebanyak 44,88 juta orang. Dari jumlah itu, jumlah murid paling banyak di jenjang Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 24,08 juta orang. Meski demikian, jumlahnya turun 1,05% dibandingkan pada 2021/2022 yang sebanyak 24,33 juta orang. Kemudian, jumlah murid di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 9,89 juta orang. Angkanya pun turun 1,76% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 10,06 juta orang. Jumlah murid di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di tanah air sebanyak 5,17 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 1,44% dibandingkan periode sebelumnya yang sebanyak 5,06 juta orang. Sementara, jumlah murid di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 5,05 juta orang. Jumlahnya menurun 6,28% dibandingkan pada 2021/2022 yang sebanyak 5,39 juta orang. Ada 20 negara yang masuk dalam peringkat pendidikan terbaik 2023 dan Indonesia tidak masuk di dalamnya. Indonesia berada pada peringkat 67 dari 203 negara. Tingkat Intelligence Quotient (IQ) masyarakat Indonesia juga dinilai rendah. Berdasarkan laporan World Population Review dengan judul Average IQ by Country 2022, Indonesia ditempatkan pada peringkat 10 dari 11 negara di Asia Tenggara. Di tingkat global, Indonesia menduduki peringkat 130 dari 199 negara.

Peringkat Pendidikan Indonesia yang tergolong sangat jauh dari negara tetangga disebabkan oleh beberapa faktor seperti; Pemerataan pendidikan yang dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia mempunyai bermacam-macam kendala dalam melaksanakannya. Permasalahan tersebut di sebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan pendidikan, yaitu salah satunya adalah akses pendidikan yang belum merata, masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada rendahnya rasio guru dan murid. Dan belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat akses terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, dan masih rendahnya kualitas dan

kuantitas guru, maka penulis tertarik untuk membahas faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang seharusnya menikmati seluruh ilmu pengetahuan yang ada jadi terhambat karena adanya masalah masalah tersebut. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah perlu membuat pemberharuan pada sistem pendidikan yang ada. Pemerintah juga seharusnya memfasilitasi masyarakat di daerah terpencil dengan membangun sekolah-sekolah gratis dan fasilitas semacamnya. Hal ini menunjukkan masih banyak anak-anak di perkotaan, khususnya yang tinggal di daerah terpencil, yang belum mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak. Jika adapun sekolah, itu hanya berupa gubuk rapuh yang hampir roboh. Sekalipun sebuah bangunan yang terbuat dari batu bata, terkadang bangunan tersebut sudah tak layak pakai atau bahkan saat hujan, atapnya bisa bocor sehingga mengganggu proses pembelajaran. Pasal 31 UUD 1945 pada ayat 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”, namun pada ayat 2 menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya”. Kemudian, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia huruf A menyatakan bahwa “manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta Nya dianugerahi Hak Asasi untuk menjamin keberadaan hakikat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya”.

Contoh di daerah Bolaang Mongondow Selatan. Kabupaten ini baru saja mekar dari kabupaten Bolaang Mongondow. 14 tahun setelah pemekarannya dengan tingkat pendapatannya yang rendah dan tidak sepadan dengan harga jual di daerah tersebut. Kabupaten yang berada di pesisir pantai itu Sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Dengan pendapatan yang tidak rendah, banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk putus sekolah karena alasan faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Guru-guru tersebut Sebagian besar berasal dari luar daerah, seperti daerah Gorontalo atau Kotamobagu. Dapat diketahui bahwa sikap seseorang pun di bentuk oleh lingkungan sekolahnya. Banyak dari mereka yang membolos, atau melarikan diri saat jam pelajaran berlangsung. Bahkan, banyak di antara mereka yang tidak mampu naik kelas. Semua pengajar disanapun bekerja sangat keras. Tidak banyak penduduk setempat yang menyelesaikan sampai ke jenjang sarjana. Mungkin hanya orang-orang dengan latar belakang ekonomi tinggi yang memperoleh gelar sarjana. Selebihnya hanya tamatan SMP atau SMA. Bahkan beberapa dari mereka ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia satu katapun. Mukena contohnya, mereka tidak tahu apa itu mukena. Bisa di lihat dari sini bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Ini hanya contoh kecil saja dan mungkin terjadi di daerah yang kecil lainnya, seperti Papua, Nusa Tenggara Barat. Kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas juga mempengaruhi pembelajaran peserta didik. Tidak jarang guru yang merasa tidak betah jika di tempatkan di suatu tempat yang terpencil. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa gaji mereka yang tidak seberapa dan buruknya fasilitas yang tersedia membuat mereka merasa tidak nyaman sehingga mengajukan pemindahan ke kota yang lebih besar.

KESIMPULAN

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah tertinggalnya pendidikan di tempat terpencil yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Pemerintah hendaknya memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik dan mengerahkan lebih banyak tenaga pendidik ke daerah terpencil, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Pemerintah seharusnya bisa lebih terbuka dalam hal pendidikan di Indonesia. Mengingat rendahnya kualitas pendidikan, pemerintah dapat mendistribusikan guru secara merata, menyediakan fasilitas yang memadai, dan melakukan sosialisasi secara berkala. Sebab, hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan harus dipenuhi agar kualitas manusia di Indonesia dapat mandiri dan bersaing dengan negara-negara luar.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Ctn, "Pengertian Pendidikan : Fungsi, Jenis, Tujuan Menurut Ahli Umum," 16 Juni 2020.
- B. P. S. I. (BPS), "Jumlah Murid Menuntut Jenjang Pendidikan di Indonesia," 2 Mei 2023.
- M. Dr. Lestari Moerdijat S.S., "Dorong Ekosistem Pendidikan yang Lebih Inovatif dan Adaptif," 28 Agustus 2023.
- A. Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research)," vol. 1, pp. 41-53, 2020.
- D. R. (. P. R. R. Indonesia), "Pasal 31 UUD 1945 Ayat 1-5," 13 Januari 2023.
- M. RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA," 24 2 2023.
- A. A. Setiyowidi, "Pendidikan yang Tertinggal di Daerah Terpencil," 25 Oktober 2022.
- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Actualization of Civic Education as a Solid Foundation for Youth in Countering Secularism. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(2), 149-156.
- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2024). Manifestation of the Anti-Corruption Education Movement in Breaking the Growth of New Regeneration of Corruptors. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 3(2), 157-162.
- Ramadhani, A. S., Prasakti, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kajian Hukum Penyelesaian Kasus Stateless di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 871-876.
- Suriaman, S., Bribin, M. L., Mulyani, H., Permatasari, M., Vovriyenti, R., Hubi, Z. B., ... & Adham, M. J. I. (2024). Teori dan Implikasi Sosiologi Kewarganegaraan: Klasik hingga Kontemporer.
- Wulandari, M. A., Senen, A., Mukarromah, A., Nurgiansah, T. H., & Pratama, D. F. (2024, February). Critical Thinking Skill: Primary School Teachers' Knowledge and Its Learning Strategy. In *International Conference on Teaching, Learning and Technology (ICTLT 2023)* (pp. 14-22). Atlantis Press.
- Permatasari, M., Nurgiansah, T. H., Abdulkarim, A., & Prayogi, R. (2023). Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2278-2285.
- Mulyani, H., Sapriya, S., Hubi, Z. B., Insani, N. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). The Pancasila and Citizenship Education Model as a Constitutional Education in Elementary/Islamic Elementary Schools. *Al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education*, 7(1), 78-90.
- Mughni, A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Comparative Study of Interactive Learning Media with Comic Media on Civics Learning Motivation. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 786-790.
- Suriaman, S., Nurgiansah, T. H., Hariyadi, S., Rachman, F., & Hendri, H. (2024). Media

Pembelajaran dengan Pandang: Efektivitas Media Pembelajaran VAK (Visual Auditory Kinesthetic) pada Mata Pelajaran PPKn. AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(2), 1773-1779.